

## Pembelajaran Jarak Jauh dan Kuota Data Internet Gratis

### Tinjauan Atas Akuntabilitas Program Bantuan Kuota Data

#### Pesan Kunci

- Pandemi Covid-19 **memaksa perubahan** tata cara pembelajaran tatap muka menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) melalui aplikasi daring yang membutuhkan akses internet.
- Alokasi anggaran yang **sangat besar** untuk bantuan kuota data internet ditahun 2020 sebesar Rp7,21 triliun hanya dapat terealisasi dan menjangkau sebanyak 59,22% penerima manfaat dari target yang ditetapkan. Sedangkan untuk tahun 2021 dialokasikan anggaran lanjutan untuk program tersebut sebesar Rp2,6 triliun dengan target sekitar 26,9juta penerima.
- Dalam pelaksanaannya ditahun 2020 terdapat beberapa permasalahan akuntabilitas yang berpotensi mengurangi efektivitas program bantuan tersebut, di antaranya adalah basis data dalam perencanaan awal belum mempertimbangkan **kesesuaian kriteria, tingkat kebutuhan, dan kondisi geografis** tempat tinggal para calon penerima manfaat.
- Verifikasi dan validasi yang didukung dengan waktu yang cukup, pengendalian intern yang ketat dan koordinasi yang baik menjadi keharusan dalam menjamin akuntabilitas dan efektivitas atas pengelolaan program bantuan kuota data internet.
- Ketidakpastian kondisi pandemi dimasa mendatang sejatinya menjadi momentum untuk reformasi pola pembelajaran yang tidak hanya terbatas pada program penyediaan bantuan prasarana yang bersifat sementara.

## Accountability Brief

PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

[www.puskajiakn.dpr.go.id](http://www.puskajiakn.dpr.go.id) @pusatkajianakn



### Isu Strategis Bantuan Kuota Internet

Munculnya pandemi Covid-19 dan penyebarannya yang relatif cepat melalui interaksi atau kerumunan manusia sejak lebih setahun yang lalu telah membatasi mobilitas masyarakat dan berdiam di rumah untuk mencegah serta mengurangi penularan. Salah satu aktivitas rutin yang terdampak secara masif pada dunia pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar, yang biasanya dilakukan secara tatap muka harus beradaptasi dengan kebiasaan baru, yaitu Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berbasis *Video Conference* yang notabene memerlukan aplikasi daring.

Target awal bantuan kuota internet ditahun 2020 yang diberikan selama 4 bulan (September-Desember) kepada 60juta penerima dengan jumlah anggaran Rp7,21 triliun, faktanya hanya dapat direalisasikan untuk 35,59juta (59,22%) penerima manfaat yang memenuhi kriteria. Hal ini disebabkan karena target optimistis Kemendikbud sebanyak 60juta penerima tersebut belum memperhitungkan hasil verifikasi-validasi (verval) sesuai dengan kriteria, sehingga bantuan tersebut hanya dapat disalurkan kepada 35,59juta penerima. Selain itu, jangka waktu verval dinilai kurang memadai karena dilakukan hanya dalam jangka waktu satu bulan (Agustus-September).

Meskipun pembelajaran tatap muka (PTM) direncanakan pada pertengahan tahun 2021 dengan maksimal 50 persen dari kapasitas kelas, tentunya bantuan kuota internet masih dibutuhkan. Oleh karena itu, Kemendikbud tetap melanjutkan program bantuan ini terhitung sejak Maret s.d. Mei 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,6 triliun (menurun sebanyak 63,9%) untuk target sekitar 26.901.103 calon peserta.

### Titik Kritis

Penetapan target sekitar 60juta penerima pada tahun 2020 tanpa melalui proses verifikasi dan validasi (verval) calon penerima yang terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan memperhitungkan kesesuaian kriteria, telah memberi kesan adanya unsur ketergesa-gesaan dalam penyusunan kebijakan. Sehingga alokasi anggaran sebesar Rp7,21 triliun untuk program tersebut dapat dinilai tidak akuntabel dari aspek perencanaan. Faktanya menunjukkan bahwa proses verval dengan durasi waktu satu bulan terhadap calon penerima berdasarkan Dapodik hanya dapat mengakomodir 35,59juta penerima yang memenuhi kriteria.

Permasalahan akuntabilitas dilihat pada aspek pengendalian terjadi ketika diketahui sebanyak 1.694.962 penerima bantuan tidak menggunakan kuota data yang telah diterimanya atau terpakai "0" byte. Sedangkan untuk pemanfaatan kurang dari satu Gigabyte (<1 Gb) berkisar 600ribu penerima dari segala jenjang Pendidikan. Hal ini antara lain disebabkan para penerima telah memiliki kemampuan mengakses jaringan internet secara mandiri baik berupa *wifi* maupun kuota data pribadi. Dengan demikian, kondisi tersebut dapat dinilai sebagai pemborosan keuangan negara, terutama ditinjau dari tidak optimalnya pengendalian terhadap penerima yang menggunakan kurang dari satu Gigabyte. Meskipun pihak Kemendikbud RI menjamin adanya pengembalian dana ke kas negara sebesar Rp428.358.212.820,00 oleh pihak operator seluler untuk penggunaan kuota data "0" byte.

**Penanggung Jawab:**

Helmizar

**Ketua:**

Eko Adityo Ananto

**Anggota:**

Teuku Surya Darma  
Mochammad Ramadhan  
Hamas Wuryantina  
Trisyra Livy Astari

**Design by:**

Cahyo Bagaskara

**Referensi**

Chabibie, M. Hasan (2021). "Bantuan Kuota Data Pendidikan 2021". *Paparan*. Jakarta: Pusdatin Kemendikbud.

Dewi, Elya Kusuma., Qadriah, Sari Laelatul., & Yusron, Ahmad (2021). "Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Bantuan Kuota Data Internet (Studi Kasus)". *Paparan*. Cianjur: UMC.

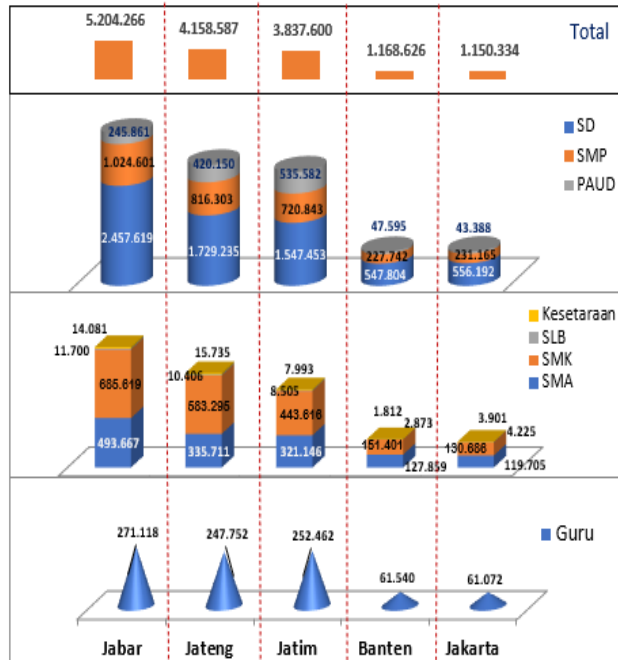
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020). Peraturan Sekjen Kemendikbud Nomor 14 Tahun 2020.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2021). *Paparan dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI* pada Tanggal 20 Januari 2021.

Mijaya, Wahyu (2021). "Pengembangan Teknologi Informasi Pendidikan Jawa Barat". *Paparan*. Bandung: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, terkait efektivitas pendistribusian dapat dijelaskan bahwa jangkauan wilayah penerima bantuan lebih terfokus di wilayah Pulau Jawa dan belum menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan mutu pembelajaran antar daerah selama masa pandemi.

**Wilayah Provinsi (5 besar) Penerima Bantuan Kuota Internet Tahun 2020**



Sumber: Pusdatin Kemendikbud RI (2021)

internet tertinggi di Indonesia justru datang dari Provinsi NTT yang notabene termasuk kategori daerah 3T yang tentunya masih mengalami kendala dalam infrastruktur jaringan internet maupun listrik.

Selain itu, pengajuan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) oleh satuan pendidikan kepada pemerintah pusat merupakan faktor yang sangat mempengaruhi Provinsi Jawa Barat sebagai wilayah penerima terbesar bantuan kuota data internet. Diketahui terdapat 42.700 calon penerima yang mengunduh form SPTJM melalui satuan pendidikan masing-masing, kemudian terdapat 41.436 calon penerima yang SPTJM-nya diunggah oleh pengelola satuan pendidikan tingkat SMA/Sederajat dibawah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ke dalam aplikasi verifikasi dan validasi Kemendikbud dan akhirnya terdapat 40.901 penerima yang disetujui oleh Kemendikbud atau mencapai 98,71%. Sehingga dalam hal ini potensi subyektivitas oleh Satuan Pendidikan dalam pengajuan SPTJM akan menghasilkan data penerima yang tidak tepat sasaran, dimana sangat dimungkinkan terdapat data tenaga pendidik maupun peserta didik yang sudah mempunyai kecukupan dalam akses internet tetapi tetap menerima bantuan.

Gambar disamping ini memberikan penjelasan bahwa penerima bantuan kuota internet khususnya untuk jenjang dikdasmen sebagian besar terdistribusi di Pulau Jawa terutama Provinsi Jawa Barat. Padahal hasil survei penetrasi internet tahun 2018 memperlihatkan data penetrasi pengguna internet di Jawa Barat hanya 58,3% atau dibawah rata-rata nasional sebanyak 64,8%. Sedangkan sisi lainnya, Pusdatin Kemendikbud RI menyatakan bahwa konsumsi bandwidth

**Rekomendasi**

- Ketepatan atau presisi dengan level tertinggi yang dihadirkan oleh Kemendikbud terhadap calon penerima diharapkan dapat menjamin efektivitas program bantuan kuota data internet pada masa mendatang.
- Verifikasi dan validasi dalam rangka menguji kesesuaian antara calon penerima bantuan melalui instrumen SPTJM dengan Dapodik menjadi langkah utama yang harus dilakukan Kemendikbud untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program.
- Begitupun kepastian data calon penerima bantuan diantaranya dapat dihasilkan melalui pemutakhiran dan kelengkapan Dapodik secara berkala dan terintegrasi pada semua level pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah.
- Perubahan pola atau model pembelajaran dimasa pandemi menjadi momentum dalam perumusan Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 sebagai *grand design* Pendidikan Nasional yang efektif, fleksibel, dan berkelanjutan.